

## Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kawasan UMKM di Gedung Juang Kabupaten Pandeglang

Resa Andriani,<sup>1</sup> Khoeru Rosi,<sup>2</sup> Fahriansyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya

Email:resaandriani@gmail.com

### ARTICLE INFO

#### Article History

Submission: 30 Desember 2025

Accepted: 31 Desember 2025

Published: 1 Februari 2026

#### Keywords:

Government Policy;

Waste Management;

MSME Areas



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

### ABSTRACT

Waste management in the micro, small, and medium enterprises (MSMEs) area is an environmental issue that has not been fully addressed optimally by the local government, particularly in the Gedung Juang MSME area of Pandeglang Regency. This study aims to analyze the implementation of government policies on waste management and identify supporting and inhibiting factors for its implementation. The study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of waste management policies in the Gedung Juang MSME area has not been running effectively. The main obstacles include weak coordination between agencies, limited infrastructure, and low participation of MSME actors. This study provides a theoretical contribution to the development of studies on the implementation of public policies based on community participation and government ecology. Practically, the results of the study are expected to be a consideration for local governments in formulating more sustainable waste management policies. The limitations of this study lie in the limited location coverage, so further studies are needed with a wider area and method.

## PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang seringkali menjadi sorotan dalam masyarakat. Permasalahan ini sudah menjadi persoalan serius terutama di kota-kota besar, tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Banyak negara maju yang telah melakukan berbagai usaha untuk mengatasi masalah tersebut, akan tetapi belum memberi dampak yang signifikan. Pengelolaan sampah menjadi permasalahan serius bagi Indonesia. Jumlah timbunan sampah yang mencapai 175.000 ton/hari atau setara dengan 64 juta ton/tahun pola pengelolaan sampah di Indonesia sebagai berikut: diangkut dan ditimbun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (69%), dikubur (10%), dikompos dan didaur ulang (7%), dibakar (5%), dan sisanya tidak terkelola (7%). Saat ini lebih dari 90% kabupaten/kota di Indonesia masih menggunakan sistem open dumping, yaitu sampah dibuang begitu saja dalam sebuah tempat pembuangan akhir tanpa dikelola. Upaya pemilahan dan pengelolaan sampah masih sangat terbatas sehingga sampah tertimbun di TPA (Fitri,2019). Sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat mengganggu kebersihan lingkungan, menimbulkan bau, dan mengakibatkan munculnya berbagai penyakit. Namun demikian, kesadaran masyarakat akan bahaya tersebut masih sangat rendah. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan atau membuangnya ke aliran sungai baik dalam skala kecil maupun skala besar.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Kabupaten pandeglang sebagai salah satu kabupaten di provinsi banten juga menghadapi permasalahan serius terkait pengelolaan sampah . Berdasarkan laporan

Pemerintah Kabupaten Pandeglang diketahui bahwa total sampah di Pandeglang bisa mencapai 409 ton per hari, namun sampah yang bisa dikelola hanya 109 ton saja. Sisa sampah yang tidak terangkut ke TPA sekitar 300 ton. Sisa sampah yang tidak diangkut biasanya mengendap di sungai lalu mengakibatkan kerusakan pada ekosistem. (Detiknews, 20 januari 2021). Pada pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kabupaten Pandeglang yang terletak di wilayah Provinsi Banten dengan jumlah penduduk 383.854 jiwa, produksi sampah mencapai 300 m<sup>3</sup>/hari. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikansi antara kapasitas pengelolaan sampah dengan volume sampah yang di hasilkan setiap hari. Salah satu area yang berpotensi menghasilkan sampah cukup besar namun kurang mendapat perhatian adalah kawasan UMKM, seperti yang ada di Gedung Juang Kabupaten Pandeglang. Di tempat ini, usaha berjalan setiap hari mulai dari kuliner, kerajinan, hingga perdagangan yang otomatis menghasilkan berbagai jenis sampah. Kawasan UMKM memiliki karakteristik unik dengan aktivitas ekonomi yang padat dan beragam, sehingga menghasilkan jenis sampah yang heterogen mulai dari sampah organik, anorganik, hingga sampah berbahaya. Sayangnya, belum terlihat sistem pengelolaan sampah yang jelas dan terstruktur di kawasan ini. Sampah sering dibuang tanpa dipilah dan tidak ada penampungan yang memadai sehingga setiap malam setelah selesai berjualan, sampah berserakan yang menimbulkan kekumuhan dan kurang enak dipandang.

Hal ini juga dapat mempengaruhi ekologi didalam pemerintahan dengan adanya penigkatan yang terus terjadi pada jumlah sampah, Kebijakan dari pemerintah terutama tentang Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan diharapkan bisa menekan peningkatan dari kuota sampah yang terus meningkat, serta juga mendapatkan dampak yang baik terhadap ekologi pemerintahan yang dimana pemerintahan dapat lebih terfokus pada masalah yang lain tanpa harus terkena dampak dari masalah pengelolaan sampah. Hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah memiliki nama lain yaitu ekologi pemerintahan. Ekologi pemerintahan yakni sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan karena dengan memiliki ekologi pemerintahan yang baik, maka ketepatan dan kesuksesan dalam pembuatan kebijakan maupun implementasinya semakin akurat. Menurut (Hasibuan 2019), sistem ekologi terbentuk melalui interaksi timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, di mana subsistem yang saling berinteraksi dalam kerangka organisasi disebut sebagai ekosistem pada intinya adalah bahwa sistem ekologi muncul karena ada hubungan keterkaitan antara makhluk hidup dan antara lingkungannya, dan ketika subsistem tersebut berinteraksi di dalam suatu organisasi atau lingkungan tertentu, itu membentuk apa yang disebut ekosistem. Ini mencerminkan pandangan bahwa elemen-elemen dalam suatu ekosistem saling memengaruhi dan bergantung satu sama lain dalam menciptakan suatu keseimbangan dinamis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di kawasan UMKM Gedung Juang Pandeglang berjalan efektif, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan model implementasi kebijakan berbasis partisipatif dalam pengelolaan lingkungan. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan pelaku UMKM dalam merancang strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berdaya guna. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada evaluasi kebijakan, tetapi juga pada



pencarian solusi kolaboratif yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal. Upaya ini diharapkan menjadi langkah nyata menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) nomor 11 dan 12, yaitu kota dan komunitas berkelanjutan serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Creswell (2018), pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna suatu fenomena sosial secara mendalam melalui proses eksploratif dan naturalistik. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggambarkan secara komprehensif implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di kawasan UMKM Gedung Juang Kabupaten Pandeglang. Penelitian difokuskan pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dianalisis menggunakan teori George C. Edward III (1980) dengan empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Lokasi penelitian di kawasan UMKM Gedung Juang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang dipilih karena merupakan pusat kegiatan ekonomi dengan volume sampah signifikan.

Subjek penelitian meliputi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang sebagai pelaksana kebijakan dan Dinas koperasi usaha kecil dan menengah pedagang dan perindustrian (DKUPP) Sebagai fasilitator pelaku UMKM di kawasan Gedung Juang Pandeglang sebagai pihak penerima kebijakan dan . Informan ditentukan secara purposive, yaitu individu yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Informan terdiri dari pejabat Dinas Lingkungan Hidup (Kepala Dinas Lingkungan hidup dan petugas lapangan), Kepala Dinas (DKUPP) pengurus UMKM, serta 2 pelaku UMKM yang telah beroperasi minimal 1 tahun. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahapan analisis data yang diadopsi oleh Miles dan Huberman. Adapun langkah-langkah analisis data berdasarkan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data. Data yang diperoleh melalui hasil wawancara kemudian dianalisis, dideskripsikan dan dikategorisasikan dari yang sama sampai yang berbeda dan data yang diperoleh akan menghasilkan kesimpulan. (Hikmah et al., 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Struktur Birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di kawasan UMKM Gedung Juang Kabupaten Pandeglang belum berjalan secara optimal. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat lokal. Dari aspek komunikasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi terkait kebijakan pengelolaan sampah belum dilakukan secara intensif dan berkelanjutan kepada pelaku UMKM. Sosialisasi kebijakan masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek teknis pengelolaan sampah, seperti pemilahan sampah, jadwal pengangkutan, serta mekanisme pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Akibatnya, sebagian besar pelaku UMKM belum memahami secara utuh peran dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan sampah. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Edwards III



yang menegaskan bahwa komunikasi yang tidak jelas dan tidak konsisten akan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

Pada aspek sumber daya, penelitian menemukan adanya keterbatasan baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Ketersediaan tempat penampungan sampah yang memadai di kawasan UMKM Gedung Juang masih sangat terbatas, sehingga sampah seringkali menumpuk dan berserakan setelah aktivitas usaha selesai. Selain itu, jumlah petugas kebersihan dan armada pengangkut sampah belum sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan. Keterbatasan sumber daya ini berdampak langsung pada rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, sebagaimana ditegaskan oleh Edwards III bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kecukupan sumber daya pendukung. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dan pelaku UMKM masih belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah yang optimal. Meskipun terdapat komitmen dari pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan DKUPP, namun tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap kebijakan pengelolaan sampah masih rendah. Sebagian pelaku UMKM masih menganggap pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah semata, bukan sebagai tanggung jawab bersama. Rendahnya partisipasi ini menunjukkan bahwa aspek disposisi belum terbentuk secara kuat, sehingga kebijakan sulit diimplementasikan secara efektif.

Dari sisi struktur birokrasi, penelitian menemukan bahwa koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pengelolaan sampah di kawasan UMKM Gedung Juang belum berjalan optimal. Pembagian tugas dan kewenangan antara Dinas Lingkungan Hidup dan DKUPP belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu mekanisme kerja yang jelas. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan berjalan secara parsial dan tidak terkoordinasi dengan baik. Struktur birokrasi yang belum sederhana dan adaptif ini menjadi salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III bahwa struktur birokrasi yang kompleks dapat memperlambat pencapaian tujuan kebijakan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menguatkan teori implementasi kebijakan publik bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh proses implementasinya di lapangan. Dalam konteks pengelolaan sampah di kawasan UMKM Gedung Juang, lemahnya komunikasi, keterbatasan sumber daya, rendahnya disposisi pelaku, serta belum optimalnya struktur birokrasi menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah masih memerlukan penguatan dari sisi partisipasi dan koordinasi. Temuan ini juga relevan dengan konsep ekologi pemerintahan, di mana hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

### Implementasi kebijakan publik

Implementasi kebijakan publik (*public policy implementation*) merupakan salah satu tahapan penting dari proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar dapat memberikan dampak terhadap tujuan yang diinginkan (Roring, Mantiri, & Lopian, 2021). Implementasi kebijakan publik merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran sebagaimana telah dirumuskan dalam perencanaan kebijakan. Abidin (2012) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan hanya menjadi dokumen normatif yang tidak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dengan demikian, implementasi berperan sebagai jembatan antara perumusan kebijakan dan realisasi manfaatnya di lapangan.



Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dan sering kali bermuatan politis karena adanya intervensi berbagai kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan proses sosial dan politik yang memerlukan koordinasi lintas sektor. Sabatier dan Mazmanian (1980, dalam Hastuti, Anwar, & Darmi, 2021) menegaskan bahwa implementasi kebijakan sering dianggap sebagai tahap pelaksanaan dari apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan seolah-olah tidak berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Namun pada kenyataannya, tahap implementasi sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan karena kebijakan tidak akan berarti dan tidak dapat mencapai tujuannya tanpa implementasi yang baik dan benar. Pandangan ini memperkuat pentingnya kesiapan sumber daya, komunikasi antaraktor, dan komitmen pelaksana dalam memastikan efektivitas implementasi.

Implementasi kebijakan juga dapat dipahami sebagai tahap yang menghubungkan antara penetapan suatu kebijakan, seperti pengesahan undang-undang, penerbitan perintah eksekutif, keputusan pengadilan, atau pengundangan peraturan, dengan konsekuensinya bagi masyarakat yang terpengaruh. Teori yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan yaitu teori Edwards (1980), yang menjelaskan empat dimensi implementasi kebijakan yang saling berhubungan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi ini menjadi acuan penting dalam menilai sejauh mana kebijakan dapat berjalan secara efektif di tingkat pelaksana. Dalam konteks partisipasi masyarakat, digunakan teori Davis dan Newstrom (1989), yang mengemukakan tiga gagasan utama dalam partisipasi, yaitu keterlibatan emosional dan mental, motivasi untuk berkontribusi, serta penerimaan tanggung jawab (dalam Puspita et al., 2023). Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci yang memperkuat implementasi kebijakan, karena keberhasilan suatu program sering kali bergantung pada dukungan dan keterlibatan aktif warga. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga memerlukan pendekatan kebijakan publik yang komprehensif, termasuk partisipasi masyarakat dan koordinasi antar lembaga. Keterkaitan antara teori implementasi kebijakan dan konsep pengelolaan sampah menjadi penting karena efektivitas kebijakan pengelolaan sampah sangat bergantung pada sejauh mana prinsip-prinsip implementasi dapat diterapkan secara konsisten di lapangan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di kawasan UMKM Gedung Juang Kabupaten Pandeglang belum berjalan secara optimal. Dari sisi sumber daya, keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta minimnya dukungan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, disposisi atau sikap pelaksana dan pelaku UMKM menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Struktur birokrasi yang belum terkoordinasi secara optimal juga menyebabkan pelaksanaan kebijakan berjalan parsial dan belum terintegrasi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kawasan UMKM memerlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan partisipasi pelaku UMKM, serta dukungan sumber daya yang memadai. Kesimpulan ini menunjukkan pentingnya pendekatan kebijakan yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan agar pengelolaan sampah di kawasan UMKM dapat berjalan lebih efektif dan mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.



### DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Detiknews. (2021, Januari 20). *Sampah di Pandeglang capai ratusan ton per hari*. Diakses dari <https://news.detik.com>
- Edwards, G. C. III. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Fitri, R. (2019). Pengelolaan sampah dan tantangannya di Indonesia. *Jurnal Lingkungan Hidup*, 12(2), 45-56.
- Hasibuan, M. (2019). Ekologi pemerintahan dalam perspektif kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 23-35.
- Hastuti, S., Anwar, M., & Darmi, T. (2021). Implementasi kebijakan publik dalam perspektif Sabatier dan Mazmanian. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 101-112.
- Hikmah, N., Rahman, A., & Putri, D. (2022). Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. *Jurnal Metodologi Penelitian Sosial*, 4(1), 50-60.
- Ismanto, B. (2020). Kebijakan pengelolaan sampah daerah dalam perspektif hukum lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 7(1), 15-28.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Notoatmodjo, S. (2007). *Kesehatan masyarakat: Ilmu dan seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Putra, R. A., & Ismaniar, I. (2020). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 89-98.
- Puspita, D., Lestari, S., & Wijaya, R. (2023). Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 55-68.
- Roring, F., Mantiri, M., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi kebijakan publik dan tantangannya. *Jurnal Governance*, 3(2), 75-84.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

